

PERAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA PADA DINAS PARIWISATA DI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU

KEVIN AL-HAJ KAIRO
NPP. 31.0279

Program Studi Sumber Daya Manusia Sektor Publik
email : kevinalkairo@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Ajud Tajudin, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Background (GAP): Kaur Regency is one of the leading tourist destinations and has experienced rapid tourism development. However, the role of the Civil Servants of the Kaur Regency Tourism Office has not been optimal in the development of tourism destinations in Kaur Regency due to insufficient promotion and marketing of tourism, lack of public awareness, and insufficient quality and capacity of the Civil Servants of the Kaur Regency Tourism Office. **Objective:** This study aims to determine and analyze the role of the Civil Servants of the Tourism Office in the development of tourist destinations in Kaur Regency, Bengkulu Province. **Method:** This research uses Levinson's theory within Soekanto to measure the role of Civil Servants of the Kaur Regency Tourism Office. The design used is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection methods include interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** The research results indicate that the role of Civil Servants in the development of tourist destinations at the Kaur Regency Tourism Office has been quite effective as they have acted as leaders, planners, policymakers, and communicators. However, their management is not yet optimal due to various obstacles faced in the tourism destination development process in Kaur Regency. **Conclusion:** This is evident from the programs established by the Kaur Regency Tourism Office for tourism destination development, which have not been fully realized in their implementation. Factors hindering this include insufficient funding for tourism development, lack of quality human resource capacity, and lack of public awareness in maintaining environmental cleanliness. Efforts to overcome these obstacles include increasing funding for tourism development by attracting investors, improving the quality of human resources through specialized training and mentoring, and collaborating with the community to organize environmental cleanliness through the establishment of Pokdarwis (Tourism Awareness Groups) and socialization. **Keywords:** Role, Civil Servants, Tourism Destination Development

Keywords: Role, ASN, Tourism Destination Development

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Kabupaten Kaur merupakan salah satu penyumbang destinasi wisata unggul serta memiliki perkembangan kepariwisataan yang cukup pesat. Namun dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kaur ini peran Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur

belum maksimal karena masih kurangnya promosi dan pemasaran wisata, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya kualitas dan kemampuan ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Levinson dalam Soekanto dalam mengukur peran Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur. Desain yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan Peran Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan destinasi wisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur telah berjalan dengan cukup baik karena telah berperan sebagai pemimpin, pembuat rancangan, pembuat kebijakan, dan komunikator, namun belum maksimal dalam pengelolaan dikarenakan masih banyaknya hambatan yang dialami dalam proses pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kaur. **Kesimpulan:** Hal ini dilihat dari program yang telah dibuat Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur dalam pengembangan destinasi wisata pada pelaksanaannya belum bisa terealisasi sepenuhnya. Faktor yang menghambat yaitu minimnya pendanaan dalam pengembangan destinasi wisata, kurangnya kualitas kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan pendanaan dalam pengembangan pariwisata dengan menarik investor, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pembinaan dan pelatihan khusus, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk penataan kebersihan lingkungan dengan membentuk Pokdarwis dan sosialisasi.

Kata Kunci: Peran, ASN, Pengembangan Destinasi Wisata.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sektor pariwisata dianggap sebagai solusi vital bagi pemerintah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai fokus utama karena peran strategisnya dalam ekonomi nasional. Pariwisata memiliki dampak positif yang luas, seperti meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang perkembangan infrastruktur untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan dan merawat potensi wisata di setiap wilayah sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya tarik dan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat setempat.

Peran pemerintah daerah sebagai pengelola di bidang pariwisata sangatlah signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah memiliki otonomi untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya sendiri. Pariwisata merupakan salah satu dari 8 bidang pemerintahan yang menjadi pilihan, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pentingnya pengembangan sektor pariwisata ini tercermin dalam upaya terus menerus dalam membangun dan mengeksplorasi potensi pariwisata yang ada di wilayah tersebut.

Kabupaten Kaur memiliki peraturan daerah yang mengatur perihal mengenai pariwisata secara sah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 32 Tahun 2022. Dahulu, Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga telah berubah menjadi Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memaksimalkan promosi dan paparan potensi pariwisata di Kabupaten Kaur, sambil juga menyediakan Aparatur Sipil Negara yang terampil dalam manajemen pariwisata. Namun, dalam pelaksanaannya, Kabupaten Kaur sendiri masih belum membuat peraturan yang spesifik tentang kepariwisataan, sehingga pelaksanaan kepariwisataan di Kabupaten Kaur belum tergambar jelas arah dan tujuannya.

Secara geografis, Kabupaten Kaur terletak di koordinat 103° 4'8,76''-103°46'50,12'' Bujur Timur dan 04°15'8,21''- 04°55'27,77'' Lintang Selatan. Wilayah daratan Kabupaten Kaur memiliki luas mencapai 2.365 km² dengan garis pantai sepanjang kira-kira 89,17 km. Meskipun memiliki potensi wisata yang luas, Kabupaten Kaur masih menghadapi kendala aksesibilitas yang sulit, terutama melalui jalur darat yang memakan waktu perjalanan yang cukup lama.

Pada tiga tahun terakhir, jumlah pengunjung di Kabupaten Kaur mengalami penurunan, menunjukkan bahwa sektor pariwisata tidak berjalan maksimal. Meskipun demikian, Kabupaten Kaur memiliki beberapa destinasi wisata andalan yang dapat dikunjungi oleh wisatawan, seperti Pantai Laguna, Pantai Cukoh, dan Pantai Pengubaian. Namun, masih terdapat destinasi wisata yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, terutama yang masih dalam tahap rintisan dan berkembang.

Diperlukan kontribusi yang signifikan dari pemerintah daerah, terutama Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, dalam mengarahkan dan meningkatkan pengembangan pariwisata secara lebih fokus dan berkelanjutan. Ini termasuk dalam hal administrasi serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung yang memadai. Namun, Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur masih menghadapi keterbatasan dalam kemampuan Aparatur Sipil Negara di sektor pariwisata, terutama dalam hal pendidikan dan penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Menurut Hasibuan (2020:10) "MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat". Sedangkan menurut Wirman Syafri dan Alwi (2014:10) MSDM adalah "Proses kegiatan perencanaan, perekrutan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif".

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pemerintah daerah terus menerus melakukan upaya promosi pariwisata. Namun, Kabupaten Kaur masih belum terlalu dikenal oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, peran Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur dalam memberikan pemasaran dan branding wisata Kaur sangat diperlukan agar lebih dikenal oleh wisatawan.

Dalam rangka mengatasi tantangan dalam pengembangan pariwisata, diperlukan peningkatan dalam pengelolaan, perawatan, dan pemeliharaan destinasi wisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur. Peran Aparatur Sipil Negara dalam dinas ini sangat penting, dan diperlukan kontribusi yang baik dan profesionalisme dari mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengatasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kaur.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur dalam pengembangan destinasi wisata. Dengan menggunakan metode

kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana peran ASN dalam memimpin, merancang, membuat kebijakan, dan berkomunikasi dalam pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi ASN dalam pengembangan destinasi wisata serta upaya yang dilakukan oleh mereka untuk mengatasi hambatan tersebut. Melalui pemahaman yang mendalam tentang peran dan tantangan ASN dalam pengembangan pariwisata, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah dan stakeholders terkait untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Kaur.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Meskipun penelitian sebelumnya telah menyelidiki berbagai faktor yang memengaruhi disiplin kerja pegawai, masih ada beberapa kesenjangan masalah yang perlu diatasi. Pertama, ada kekurangan dalam literatur mengenai pengaruh teknologi baru, seperti sistem absensi sidik jari, terhadap kedisiplinan pegawai. Kedua, penelitian sebelumnya cenderung memfokuskan pada faktor-faktor individual, seperti motivasi atau pengawasan, tanpa mempertimbangkan interaksi kompleks antara faktor-faktor ini. Ketiga, kebanyakan penelitian terbatas pada wilayah geografis atau sektor pekerjaan tertentu, sehingga kurangnya generalisasi dalam temuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyelidiki pengaruh teknologi absensi sidik jari, menjelajahi interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi disiplin kerja, dan memperluas cakupan penelitian untuk mencakup berbagai konteks kerja. Dengan melakukan hal ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik tentang kedisiplinan di tempat kerja.

1.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menggali peran pemerintah atau lembaga terkait dalam pengembangan objek wisata di berbagai daerah. Sebagai contoh, Magfirah T. Idris dan Agus Zainal Abidin (2019) melakukan penelitian tentang peran Pemerintah Kota Malang dalam pengembangan Kampung Tridi dan Jodipan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang belum sepenuhnya optimal dalam perannya, meskipun telah terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan teori peran Selo Soemardjan.

Seorang peneliti lain, Aidul Adhan (2020), meneliti tentang peran Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi dalam pengembangan Objek Wisata Candi Muaro Jambi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa perkembangan Wisata Candi Muaro Jambi belum sesuai dengan harapan, terutama karena tantangan seperti keterbatasan dana, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan teori peran Levinson dalam Soekanto.

Selain itu, penelitian oleh Dinda Zizwatin Ainia, Afifuddin, dan Suyeno (2021) mengenai pengembangan objek wisata Bukit Setigi di Desa Sekapuk, Kabupaten Gresik, juga menjadi acuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sekapuk berhasil menjalankan perannya secara efektif dalam perencanaan pembangunan objek wisata, pengorganisasian tenaga kerja, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan teori peran Pitana dan Gayatri.

Loi, R. R., & Buulolo, G. (2022). PERANAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan). Kinerja Aparatur Sipil Negara masih kurang dalam membagikan pelayanan publik sebab minimnya sarana fasilitas serta prasarana di Kantor Camat Teluk Dalam sehingga pekerjaan menjadi lelet serta pula pelayanan publik tidak selesai pas pada waktunya.

Ritonga, S., & Nasution, I. (2017). Analisis data yang digunakan untuk mengetahui peran Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat adalah dengan metode siklus dari Miles dan Hubermann yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Responden dalam penelitian ini adalah Camat, Pegawai Kecamatan, masyarakat di sekitar Kecamatan Muarasipongi. Hasil penelitian berdasarkan data yang sudah diperoleh dan pengamatan peneliti bahwa Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat di Kecamatan Muarasipongi secara positif sudah melaksanakan perannya sebagai Perencana, Pelaksana, Pengawas.

Lantapon, G. T. (2018). Aparatur sipil Negara tentunya mempunyai peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena (ASN) yang memegang kekuasaan dan kewenangan atas keuangan. maka perlu menegaskan kembali di antaranya melalui : Penyempurnaan undang-undang Anti Korupsi yang lebih komprehensif, mencakup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi. Kontrak politik yang dibuat pejabat public, Pembuatan aturan dan kode etik khususnya bagi PNS, dan Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai).

Dadang, A. M., & Ahmad, B. (2021). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Pemebrdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana belum optimal karena adanya beberapa kendala salah satunya adalah jumlah pegawai tidak sesuai dengan beban kerja

Irghiaksa, B. (2022). Tujuan penelitian untuk mengetahui peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi Masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi peranan aparatur pemerintah desa dan partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Kuesioner, dan Data Kepustakaan. Data diolah melalui table frekuensi dan persentase. Populasi penelitian ini adalah seluruh Masyarakat di Desa dan sampel yaitu Masyarakat yang dianggap banyak mengetahui terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi

Sisilia, D., & Erlin Kurniawati, M. M. Etika aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik selama ini mendapat perhatian khusus guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai Standar Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Pelayanan Publik pada Kantor Catatan Sipil Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaan. Dalam kajian administrasi publik, peraturan etika administrasi sipil negara yang sering disebut kode etik pegawai negeri sipil adalah ketentuan atau standar yang mengatur perilaku moral aparatur/PNS.

Sinurat, H. P. (2018). Peranan aparatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air sangat menentukan kualitas pelayanan informasi bidang sumber daya air. Maka dari itu peranan aparatur sangat diharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan melalui Sistem Informasi Geografis bidang Sumber Daya Air (SIGSDA).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki fokus dan lokasi penelitian yang berbeda, mereka memberikan wawasan yang berharga tentang peran pemerintah atau lembaga terkait dalam pengembangan destinasi wisata. Dengan memahami temuan-temuan tersebut, penelitian ini dapat melengkapi pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan peran Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur dalam pengembangan destinasi wisata di wilayah tersebut.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang menyoroti peran pemerintah atau lembaga terkait dalam pengembangan pariwisata, penelitian ini menekankan secara khusus pada ASN Dinas Pariwisata sebagai pemain utama dalam proses ini. Dengan fokus pada ASN, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi dalam mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap pengembangan destinasi wisata.

Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur terkait dengan analisis terhadap faktor penghambat yang dihadapi ASN Dinas Pariwisata dalam mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Kaur. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan tersebut, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi kebijakan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Terakhir, penelitian ini juga memberikan sumbangan baru dalam konteks upaya peningkatan kembali pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Kaur. Melalui analisis terhadap upaya yang dilakukan oleh ASN Dinas Pariwisata dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret dan berbasis bukti bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.

1.5 Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dengan memfokuskan pada peran ASN, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi mereka dalam upaya mengoptimalkan potensi pariwisata daerah tersebut. Melalui pemahaman ini, diharapkan dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan ASN dalam menjalankan perannya serta menemukan cara untuk meningkatkan kontribusi mereka dalam pengembangan pariwisata.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh ASN Dinas Pariwisata dalam mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Kaur. Dengan mengeksplorasi hambatan-hambatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi oleh ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi kendala-kendala tersebut untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Terakhir, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh ASN Dinas Pariwisata dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kaur. Dengan mengevaluasi upaya-upaya tersebut, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret dan berbasis bukti bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan pariwisata di wilayah tersebut.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam, rinci, dan tuntas. Menurut Whitney dalam Moh Nazir (2014:16), Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian deskriptif digunakan untuk mempelajari peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kaur. Pendekatan induktif digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta yang ada untuk dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan dan hubungan antara fenomena tersebut.

Operasionalisasi konsep dilakukan dengan menggunakan teori peran Levinson dalam Soekanto sebagai landasan teoritis. Variabel yang diteliti adalah peran ASN dalam pengembangan destinasi wisata, dengan dimensi seperti peran sebagai pemimpin, pembuat rancangan atau ide, pembuat kebijakan, pengelola, dan alat komunikasi. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, yang

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang dipilih meliputi kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, pengelola tempat wisata, dan wisatawan.

Instrumen penelitian utamanya adalah peneliti sendiri, yang bertanggung jawab atas pemilihan informan, evaluasi kualitas data, pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan kesimpulan. Menurut Arikunto dalam Mamik (2015:77) "Data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan dalam penyusunan informasi". Selanjutnya menurut Simangunsong (2017:230) data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif, yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan lokasi penelitiannya berada di Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, lingkungan objek wisata.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Di Provinsi Bengkulu

Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur memiliki peran yang sangat penting untuk pengembangan destinasi wisata, oleh karena itu diperlukan kontribusi yang baik dan profesionalisme dari Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengatasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata di wilayah tersebut. Menjadi salah satu sektor yang diandalkan pemerintah, pengembangan pariwisata di Kabupaten Kaur harus diikuti dengan upaya yang signifikan dan berkesinambungan.

3.1.1 Peran Sebagai Pembuat Rancangan atau Ide

Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kaur adalah sebuah proses yang memerlukan kreativitas dan inovasi berkelanjutan dari Dinas Pariwisata. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pariwisata berperan penting dalam merancang dan menciptakan ide-ide baru untuk menarik wisatawan. Ibu Marnida, S.Pi. M.Ling, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, dalam wawancara pada 9 Januari 2024, menegaskan bahwa:

"Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, khususnya Dinas Pariwisata, harus selalu membuat rancangan baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati."

Dari pernyataan ini, jelas bahwa ASN di Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur bertanggung jawab untuk merancang program yang sesuai dengan peraturan dan kebijakan daerah. Dalam upaya ini, mereka harus memastikan bahwa setiap rancangan bertujuan untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata.

Bapak Doni Fitrolobis, S.E, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, juga menyampaikan pada 10 Januari 2024 bahwa:

"Kami telah membuat beberapa program untuk pengembangan destinasi wisata, namun pelaksanaannya belum maksimal karena masih ada kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur."

Berdasarkan wawancara ini, terlihat bahwa meskipun sudah ada program yang dirancang, realisasinya masih terhambat oleh berbagai kendala. Rencana Strategis Pariwisata Kabupaten Kaur Tahun 2012-2026 mencakup berbagai program kegiatan untuk mendukung pengembangan objek wisata, seperti peningkatan kualitas SDM pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana, pelaksanaan promosi, dan lainnya.

Beberapa program yang telah dirancang meliputi:

1. Peningkatan kualitas SDM pariwisata.
2. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan.
3. Memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata.
4. Pelaksanaan promosi pariwisata dalam dan luar negeri.
5. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah di bidang pariwisata.
6. Penguatan dasar hukum untuk pengembangan pariwisata.
7. Alokasi dana yang optimal untuk pengembangan destinasi.
8. Optimalisasi kegiatan pemasaran wisata melalui festival/kegiatan unggulan daerah.

Walaupun Dinas Pariwisata telah aktif dalam merancang dan menghasilkan ide-ide untuk pengembangan destinasi wisata, realisasi program tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Kendala seperti kurangnya dana, minimnya infrastruktur, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi penghambat utama.

3.1.2 Peran Sebagai Pembuat Kebijakan

Kebijakan adalah fondasi penting bagi pengembangan dan pelaksanaan program kegiatan pariwisata. Proses pembuatan kebijakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur.

Menurut Ibu Marnida, kebijakan pengembangan destinasi wisata sudah diatur dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata tahun 2022-2026. Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan dalam upaya mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten Kaur. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan penataan destinasi wisata.

ASN Dinas Pariwisata tidak hanya berperan dalam pembuatan kebijakan tetapi juga dalam penerapan dan penegakan kebijakan tersebut. Mereka berusaha memastikan bahwa semua program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah ditetapkan.

3.1.3 Peran Sebagai Pengelola

Sebagai pengelola, ASN Dinas Pariwisata bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua destinasi wisata di Kabupaten Kaur dikelola dengan baik. Menurut Ibu Marnida, Dinas Pariwisata telah melakukan upaya pengelolaan yang baik, termasuk kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pihak swasta dalam mempromosikan pariwisata di Kabupaten Kaur. Namun, pengelolaan tersebut belum maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Bapak Junaidi, S.T, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, menyatakan bahwa:

"Kabupaten Kaur memiliki potensi wisata yang besar, namun pengelolaannya belum maksimal karena masih mengandalkan swadaya masyarakat. Diperlukan partisipasi pihak ketiga untuk meningkatkan pengelolaan destinasi wisata."

Berbagai kendala seperti kurangnya investor asing maupun lokal juga menghambat upaya pengelolaan ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata di Kabupaten Kaur.

3.1.4 Peran Sebagai Alat Komunikasi

ASN Dinas Pariwisata juga berperan sebagai alat komunikasi dalam mempromosikan destinasi wisata. Mereka bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun media sosial. Menurut Bapak Junaidi, promosi dan pemberian informasi mengenai destinasi wisata Kaur dilakukan untuk menarik wisatawan dari dalam dan luar kabupaten.

"Dinas Pariwisata telah melakukan promosi dan pemberian informasi mengenai destinasi wisata Kaur baik kepada masyarakat dalam maupun luar Kabupaten Kaur," jelasnya.

Promosi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperkenalkan potensi pariwisata Kabupaten Kaur. Namun, promosi yang efektif memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat setempat.\

3.2 Faktor Penghambat Dalam Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di Kabupaten Kaur

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa penghambat yang dialami oleh Aparatur pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, sebagai berikut:

1. Minimnya Anggaran Dalam Pengembangan Destinasi Wisata
2. Kurangnya Kemampuan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan.

3.3 Upaya yang dilakukan Aparatur Sipil Negara Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada dilakukan upaya oleh Aparatur Bappeda sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendanaan Dalam Pengembangan Pariwisata Dengan Menarik Investor.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Pembinaan Dan Pelatihan Khusus

3. Melakukan Kerjasama Dengan Masyarakat Untuk Penataan Kebersihan Lingkungan

3.4 Tantangan dan Peluang

Meskipun Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan destinasi wisata, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Kurangnya minat investor, keterbatasan dana, dan rendahnya partisipasi masyarakat adalah beberapa kendala utama.

Namun, Kabupaten Kaur memiliki banyak potensi wisata alam yang dapat dikembangkan menjadi destinasi unggulan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, partisipasi aktif dari berbagai pihak, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pengembangan pariwisata di Kabupaten Kaur dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Peran ASN dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kaur sangat krusial. Mereka berperan sebagai pembuat rancangan atau ide, pembuat kebijakan, pengelola, dan alat komunikasi. Namun, realisasi program dan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak. Dengan upaya bersama dan sinergi yang baik, potensi wisata Kabupaten Kaur dapat dikembangkan secara maksimal untuk menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa peran ASN di Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur sangat signifikan dalam pengembangan destinasi wisata, terutama dalam merancang program dan kebijakan yang inovatif. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terungkap bahwa meskipun program pengembangan telah dirancang dengan baik, realisasinya masih menghadapi banyak kendala. Hambatan utama termasuk kurangnya dana, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mendukung program pemerintah. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan program serta peningkatan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya kebanyakan meneliti tentang peran ASN dalam pembuatan kebijakan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada peran dari ASN dan sektor pariwisata, dan penelitian ini juga menyoroti bahwa kebijakan yang ada, meskipun sudah diatur dengan baik dalam dokumen perencanaan jangka menengah, masih perlu ditingkatkan dalam implementasinya. Kesadaran masyarakat dan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti investor dan pelaku usaha menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Promosi dan komunikasi yang dilakukan oleh ASN juga berperan penting dalam menarik wisatawan, namun memerlukan strategi yang lebih efektif dan inovatif untuk mencapai hasil yang optimal.

Kesimpulannya, penelitian ini mengindikasikan bahwa peran ASN dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kaur sangat krusial, namun membutuhkan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak. Peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat menjadi kunci sukses dalam mengatasi kendala yang ada. Dengan perbaikan dan peningkatan dalam aspek-aspek ini, destinasi wisata di Kabupaten Kaur memiliki potensi besar

untuk berkembang dan menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

3.6 Diskusi Temuan Menarik

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan menarik terkait peran ASN di Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur dalam mengembangkan destinasi wisata. Salah satu temuan yang menarik adalah inovasi dan kreativitas ASN dalam merancang program pengembangan pariwisata, meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, diketahui bahwa ASN secara aktif membuat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi wisata, seperti peningkatan kualitas SDM pariwisata dan fasilitas pendukung. Ini menunjukkan bahwa ASN memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan pengembangan pariwisata dan terus berupaya untuk mengatasi kendala yang ada dengan ide-ide kreatif.

Temuan lain yang menarik adalah peran strategis ASN sebagai pengelola dan fasilitator dalam menarik minat investor dan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata. Walaupun masih banyak tantangan dalam menarik investasi, upaya yang dilakukan oleh ASN untuk mempermudah proses perizinan dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memajukan sektor pariwisata. Hal ini penting karena kolaborasi dengan sektor swasta dan investor dapat memberikan dorongan signifikan dalam peningkatan kualitas dan fasilitas wisata di Kabupaten Kaur.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa peran ASN sebagai komunikator efektif dalam promosi pariwisata sangat penting. Melalui berbagai saluran komunikasi, baik media cetak maupun media sosial, ASN berusaha untuk memperkenalkan dan mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Kaur kepada masyarakat luas. Upaya ini tidak hanya berfokus pada wisatawan domestik tetapi juga internasional. Namun, temuan ini juga menyoroti perlunya strategi promosi yang lebih inovatif dan terintegrasi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ASN di Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur memiliki peran multifaset yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata, meskipun mereka masih perlu mengatasi berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan yang optimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan data hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengembangan destinasi wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu:

ASN di Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur telah menjalankan fungsi mereka sebagai pemimpin, perancang, pembuat kebijakan, dan komunikator dengan cukup baik. Mereka telah merancang berbagai program untuk pengembangan destinasi wisata, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hambatan-hambatan yang ada menyebabkan program-program tersebut belum dapat

teralisasi sepenuhnya. Upaya ASN melibatkan berbagai strategi seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan regulasi, dan peningkatan promosi wisata. Namun, kendala struktural dan kultural masih menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan yang sudah dirancang.

Beberapa hambatan utama dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kaur adalah minimnya sumber pendanaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kurang memadainya sarana dan prasarana pariwisata, kurangnya minat investor, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hambatan-hambatan ini menghalangi optimalisasi pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di daerah tersebut. Minimnya pendanaan membatasi kemampuan Dinas Pariwisata dalam melakukan perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Kualitas SDM yang belum memadai menyebabkan rendahnya standar pelayanan kepada wisatawan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan destinasi wisata juga mengurangi daya tarik wisatawan untuk berkunjung.

ASN Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan destinasi wisata di wilayah tersebut. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan pariwisata melalui upaya menarik investor. Di samping itu, mereka juga fokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pembinaan dan pelatihan khusus. Kolaborasi dengan masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan melalui pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan kegiatan sosialisasi. Dinas Pariwisata juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah provinsi untuk mempromosikan destinasi wisata Kabupaten Kaur secara lebih luas.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk pemahaman yang lebih komprehensif dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, cakupan geografis yang terbatas hanya pada Kabupaten Kaur mungkin tidak sepenuhnya mewakili situasi yang lebih luas di Provinsi Bengkulu atau daerah lainnya dengan kondisi yang berbeda. Hasil dan temuan yang diperoleh mungkin tidak dapat digeneralisasikan secara luas ke wilayah lain dengan karakteristik demografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Kedua, keterbatasan dalam data primer yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner mungkin dipengaruhi oleh bias responden, seperti keengganan untuk mengungkapkan informasi yang negatif atau kecenderungan memberikan jawaban yang dianggap aman.

Selanjutnya, waktu yang tersedia untuk penelitian ini juga menjadi kendala, karena penelitian dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang mungkin tidak cukup untuk mengamati perubahan dan perkembangan yang signifikan dalam upaya pengembangan destinasi wisata oleh Aparatur Sipil Negara. Selain itu, keterbatasan dalam anggaran penelitian membatasi kemampuan peneliti untuk mengumpulkan data lebih luas dan mendalam. Ketiga, aspek teknis dan operasional, seperti akses ke dokumen-dokumen internal dinas pariwisata, juga menjadi tantangan yang membatasi kedalaman analisis.

Arah Masa Depan Penelitian. Untuk penelitian di masa depan, beberapa arah penelitian dapat diambil guna memperluas dan memperdalam pemahaman mengenai peran Aparatur Sipil Negara

dalam pengembangan destinasi wisata. Penelitian komparatif antara beberapa daerah dengan karakteristik pariwisata yang berbeda dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan pengembangan pariwisata. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang praktik terbaik dan tantangan umum yang dihadapi oleh berbagai daerah.

Penelitian selanjutnya juga bisa lebih fokus pada evaluasi jangka panjang dari program dan kebijakan yang telah diterapkan oleh Dinas Pariwisata, untuk menilai dampaknya secara lebih komprehensif. Penggunaan metode longitudinal dalam penelitian ini dapat membantu mengamati perubahan dari waktu ke waktu dan memberikan wawasan lebih dalam mengenai efektivitas intervensi yang dilakukan. Selain itu, penelitian yang melibatkan analisis ekonomi dan dampak sosial dari pengembangan destinasi wisata dapat memberikan perspektif yang lebih holistik mengenai manfaat dan risiko yang terkait.

Selain itu, penelitian mendalam tentang partisipasi dan persepsi masyarakat lokal terhadap program pengembangan destinasi wisata juga penting. Studi ini dapat melibatkan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam, seperti studi kasus atau etnografi, untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial dan kultural yang mempengaruhi pengembangan pariwisata. Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan sosial dan kultural serta menemukan cara untuk meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata.

Terakhir, eksplorasi mengenai penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengembangan destinasi wisata di daerah pedesaan seperti Kabupaten Kaur bisa menjadi fokus penelitian yang menarik. Penelitian ini dapat mencakup analisis mengenai pemanfaatan media digital, aplikasi pariwisata, dan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan destinasi wisata. Pendekatan inovatif ini diharapkan dapat memberikan solusi baru dan efektif untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengembangan destinasi wisata di daerah terpencil.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Karya Ilmiah

- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mamik, 2015. *Metodologi kualitatif Sidoarjo: Zifatama Jawa*
- Idris , Magfirah T, dkk. 2019. “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan dan Kampung Tridi”. *Jurnal Respon Publik Volume 13*, Malang Universitas Islam Malang
- Adhan , Aidul. 2020. “Peran Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Muaro Jambi Dalam Upaya Pengembangan Objek Wisata Candi Muaro Jambi”. Skripsi, Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ainina , Dinda Zizwatin, dkk. 2021. “Peran Pemerintah Desa Sekapuk dalam Pengembangan Objek Wisata Bukit Setigi Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik”. *Jurnal Respon Publik Volume 13*, Gresik : Universitas Islam Malang.
- Loi, R. R., & Buulolo, G. (2022). PERANAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Kantor Camat Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 176-186. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/1256>
- Ritonga, S., & Nasution, I. (2017). Peran Aparatur Sipil Negara dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat (Studi Kasus di Kantor Camat Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal). <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/8584>
- Lantapon, G. T. (2018). Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Lex Crimen*, 7(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20393>
- Dadang, A. M., & Ahmad, B. (2021). Peran Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Biak Numfor. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 16(1), 25-32. <https://www.iyb.ac.id/jurnal/index.php/gemakampus/article/view/151>
- Irghiaksa, B. (2022). Peranan Aparatur Sipil Negara dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia. <https://osf.io/preprints/osf/n3avy>
- Sisilia, D., & Erlin Kurniawati, M. M. PERANAN ETIKA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DISDUKCAPIL) KEC. GEDONG TATAAN KAB. PESAWARAN. <https://academia.edu>
- Sinurat, H. P. (2018). Peranan Aparatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Air (Puslitbang SDA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Informasi Geografis Bidang Sumber Daya Air (SIGSDA). *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, 6(1). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi/article/view/449>

B. Peraturan

- Peraturan Bupati Kaur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

